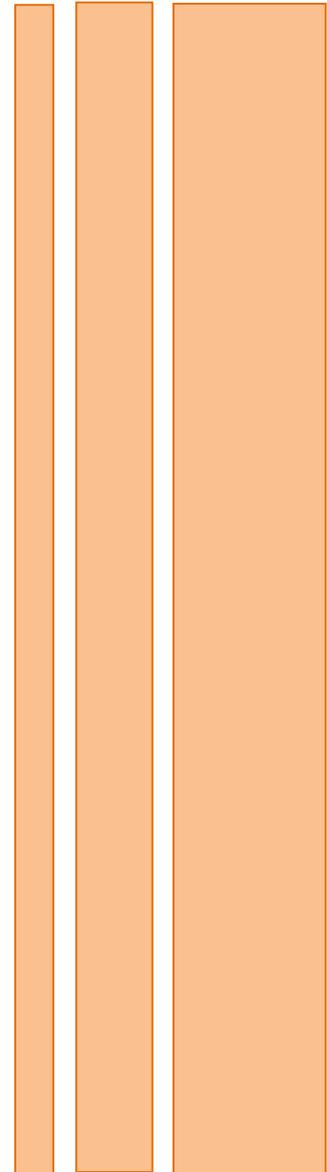


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Stasiun PSDKP Biak

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl.Adibai KM. 6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten

Biak – Numfor Papua 98156

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Biak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SKDP Biak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 31 Desember 2023

Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin, S,St.Pi, MH
NIP. 198306122008011006

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
a. Penjelasan Umum	7
b. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
c. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	65
d. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	77
e. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	87
f. Pengungkapan Penting Lainnya	90
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98
Telp.(0981) 8211818 Pos Elektronik : psdkp.biak@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Biak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 31 Desember 2023
Kepala Stasiun PSDKP Biak,



Mochamad Erwin, S,St.Pi, MH
NIP. 198306122008011006

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Stasiun PSKDP Biak ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.258.538,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp24.405.940.972,00 atau mencapai 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp24.413.120.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp15.149.421.691,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp199.973.189,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.949.448.502,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp18.149.947,00 dan sebesar Rp15.149.421.691,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.487.608,00, sedangkan jumlah beban sebesar Rp24.696.386.513,00 sehingga terdapat Defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp(24.686.898.905,00). Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp4.770.930,00 dan sebesar Rp (24.682.127.975,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(24.682.127.975,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.483.258.786,00, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp Rp(24.682.127.975,00) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp(59.771.014) serta selisih revaluasi aset tetap senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24.389.911.947,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.131.271.744,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Didalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022			TA 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	25.760.000	14.258.538	55,35	17.857.000	36.398.584	203,83
JUMLAH PENDAPATAN		25.760.000	14.258.538	55	17.857.000	36.398.584	204
BELANJA	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	5.842.308.000	5.842.286.960	100,0	5.218.400.000	5.217.031.323	100,0
Belanja Barang	B.4	16.804.496.000	16.798.068.812	100,0	11.826.625.000	11.824.831.372	100,0
Belanja Modal	B.5	1.766.316.000	1.765.585.200	100,0	557.643.000	557.635.943	100,0
JUMLAH BELANJA		24.413.120.000	24.405.940.972	99,97	17.602.668.000	17.599.498.638	99,98

II. NERACA

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 *(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	14.979.504	-	14.979.504	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(74.898)	-	(74.898)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-	-	-
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.9	-	-	-	-
Persediaan	C.10	199.973.189	86.632.535	113.340.654	130,83
Jumlah Aset Lancar		214.877.795	86.632.535	128.245.260	148,03
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-	-	-
ASET TETAP					
Tanah	C.14	4.529.803.000	4.529.803.000	-	0,00
Peralatan dan Mesin	C.15	27.222.726.187	25.888.781.077	1.333.945.110	5,15
Gedung dan Bangunan	C.16	6.303.821.055	6.303.821.055	-	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	855.830.143	855.830.143	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-	-	0,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	52.387.273	52.387.273	-	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.20	(24.015.119.156)	(22.212.240.049)	(1.802.879.107)	8,12
Jumlah Aset Tetap		14.949.448.502	15.418.382.499	(468.933.997)	(3,04)
ASET LAINNYA					
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-	(346.700.000)	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-	346.700.000	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH ASET		15.164.326.297	15.505.015.034	(340.688.737)	(2,20)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-	-	0,00
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	18.149.947	21.756.248	(3.606.301)	(100)
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.149.947	21.756.248	(3.606.301)	(16,58)
JUMLAH KEWAJIBAN		18.149.947	21.756.248	(3.606.301)	(16,58)
EKUITAS DANA					
Ekuitas	C.28	15.131.271.744	15.483.258.786	(351.987.042)	(2,27)
JUMLAH EKUITAS DANA		15.131.271.744	15.483.258.786	(351.987.042)	(2,27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.149.421.691	15.505.015.034	(355.593.343)	(2,29)

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
	D.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.487.608	7.906.340	1.581.268	-
JUMLAH PENDAPATAN		9.487.608	7.906.340	1.581.268	-
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	5.839.605.960	5.218.330.323	621.275.637	11,906
Beban Persediaan	D.3	97.102.277	115.250.092	(18.147.815)	(15,746)
Beban Barang dan Jasa	D.4	12.685.347.735	9.327.581.305	3.357.766.430	35,998
Beban Barang Pemeliharaan	D.5	1.715.075.010	1.205.275.179	509.799.831	42,297
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.186.277.835	1.402.857.127	783.420.708	55,845
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.172.977.696	1.882.229.395	290.748.301	15,447
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN		24.696.386.513	19.151.523.421	5.544.863.092	28,953
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(24.686.898.905)	(19.143.617.081)	(5.543.281.824)	28,956
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
	D.11				
Surplus /Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		4.770.930	(111.686.651)	116.457.581	(104)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		4.770.930	2.710.349	2.060.581	76
Defisit Selisih Kurs		-	-	-	-
Surplus/Defisit dar Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	25.781.895	(25.781.895)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	25.781.895	(25.781.895)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4.770.930	(85.904.756)	90.675.686	(106)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(24.682.127.975)	(19.229.521.837)	(5.452.606.138)	28,36
POS LUAR BIASA					
	D.12				
Pendapatan PNB		-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(24.682.127.975)	(19.229.521.837)	(5.452.606.138)	28,36

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2022	Kenaikan(Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	15.483.258.786	17.085.202.702	(1.601.943.916)	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(24.682.127.975)	(19.229.521.837)	(5.452.606.138)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(59.771.014)	(28.739.933)	(31.031.081)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(59.771.014)	(28.739.933)	(31.031.081)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	24.389.911.947	17.656.317.854	6.733.594.093	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(351.987.042)	(1.601.943.916)	1.249.956.874	-
EKUITAS AKHIR	E.5	15.131.271.744	15.483.258.786	(351.987.042)	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas

penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 717. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Perairan di sekitaran Samudra Pasifik.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Biak

berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
- Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP, sistem informasi, dan komunikasi pengawasan SKDP
- Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
- Informasi pengawasan SDKP yang valid, handal, dan mudah diakses
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
- Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten diantaranya sebagai berikut :
 1. PNS 29 pegawai (Struktural 2 orang, Fungsional Pengawas Perikanan 9 orang dan Fungsional Umum 7 orang) , PPPK 11 orang;
 2. Awak KP Hiu Macan 04 17 orang (PNS 15 orang , dan

tenaga kontrak 2 orang);

3. PPNPN 6 orang.
4. PJLP 10 Orang.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Biak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1 .000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian

Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan

Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak telah mengadakan 20 (dua puluh) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Revisi DIPA ke-1 dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Melakukan pengurangan dan penghapusan detil anggaran:
 - Konsumsi Rapat Perencanaan Gelar Operasi KP. Hiu Macan 04
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP
 - Konsumsi Rapat Evaluasi Gelar Operasi KP Hiu Macan 04
 - Konsumsi Rapat dalam Rangka Evaluasi Hasil Operasi Speedboat
 - Penjilidan Laporan Rapat Evaluasi Hasil Operasi
 - Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas
 - Konsumsi Ekspose Awal TPKP Sedang

- Biaya konsumsi dalam rangka rapat/pemberkasan perkara TPKP kasus kategori sedang
- Konsumsi Administrasi Penyidikan TPKP kasus kategori sedang
- ATK pada TPKP kasus kategori sedang
- Bahan komputer pada TPKP kasus kategori sedang
- Penggandaan berkas perkara pada TPKP kasus kategori sedang
- Transportasi lokal dalam rangka pemberkasan perkara kasus TPKP Sedang
- Transportasi lokal saksi
- Transportasi lokal penerjemah
- Transportasi lokal saksi
- Biaya konsumsi rapat persiapan Pengenaan Sanksi Administratif
- Biaya konsumsi dalam rangka rapat Pengenaan Sanksi Administratif
- Biaya konsumsi dalam rangka rapat pembahasan tindak lanjut perkara sanksi Administratif
- Pencetakan dan Penggandaan berkas sanksi Administratif
- Transportasi lokal dalam rangka koordinasi dengan stakeholder/instansi terkait
- Konsumsi Rapat Evaluasi Sanksi Administratif
- Pencetakan laporan evaluasi sanksi Administratif

- Pencetakan laporan tahunan evaluasi sanksi Administratif
- Sewa Perahu Motor dalam rangka pengawasan Rutin
- Sewa Perahu Motor dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan masyarakat
- Perdin Pengawasan Kawasan Konservasi Stasiun PSDKP Biak
- Perdin Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Laporan Masyarakat
- Perdin Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar
- Perdin Koordinasi Perencanaan Pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Provinsi
- Konsumsi Rapat Koordinasi Pelaksanaan Bulan Cinta Laut
- Konsumsi Rapat Persiapan
- Perjalanan dinas survey lokasi
- Perjalanan dukungan Bulan Cinta Laut
- ATK pada Pengawasan Kawasan Konservasi
- Konsumsi Kegiatan Sosialisasi pada Pengawasan Kawasan Konservasi
- Perlengkapan Peserta dan Panitia pada Pengawasan Kawasan Konservasi
- Spanduk pada Pengawasan Kawasan Konservasi
- Sertifikasi Selam
- Perdin Koordinasi pengawasan kawasan

konservasi ke Pusat

- Perdin dalam rangka sosialisasi pengawasan kawasan konservasi
- Perdin dalam rangka sertifikasi selam Polsus PWP3K
- Translok Peserta Sosialisasi Pengawasan KKP
- Perdin Koordinasi Pengawasan pemanfaatan ruang laut ke Loka PSPL Sorong
- ATK pada Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi
- Konsumsi Kegiatan Sosialisasi pada Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi
- Perlengkapan Peserta dan Panitia pada Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi
- Spanduk pada Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi
- Translok Peserta Sosialisasi Pengawasan Jenis Ikan Dilindungi
- Perdin Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar ke Pusat
- Spanduk Bersih Laut
- Umbul-umbul Bersih Laut
- Konsumsi Pelaksanaan Bersih Laut
- Kaos Peserta dan Panitia Bersih Laut
- Topi Peserta dan Panitia Bersih Laut
- Banner Bersih Laut
- Kantong Plastik Sampah
- Serokan Sampah
- Honor Sekretaris

- Honor Anggota
- Honor Penanggung Jawab
- Honor Ketua
- Sewa kendaraan roda 4
- Sewa Perahu Nelayan
- Honorarium Narasumber /Pembahas Pakar /Praktisi/Profesional Eselon
- Perjalanan Dinas Narasumber
- Transport Lokal Peserta Bersih Laut
- Perdin dalam rangka evaluasi Pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Pusat
- Konsumsi Pertemuan Evaluasi dan Penyusunan Laporan
- ATK pada Sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Spanduk Sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Pelaporan pengawasan Sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang merusak
- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan
- Konsumsi Rapat
- Spanduk
- Perlengkapan peserta
- Perdin eselon III ke bawah kegiatan Monev Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Berbasis Risiko
- Transport Lokal Peserta
- Spanduk pada Monev Capaian Kinerja Pengawasan Perikanan

- Konsumsi Rapat
- Honor Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri
- Perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan supervisi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan supervisi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan teknis Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku usaha Perikanan Berbasis Risiko
- Perjalanan dinas dalam Bimbingan Teknis Simulasi pengawasan program penangkapan ikan terukur (e-slo, ketertelusuran, pasca produksi)
- Konsumsi Rapat
- Penandaan/segel pengawasan
- Honor Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri
- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan
- Transport lokal dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait
- Konsumsi Rapat
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi

dan supervisi Pengawasan dengan
Pemerintah Daerah

- Transport lokal peserta pertemuan di daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri Rakorwas
- Konsumsi Rapat Persiapan
- Konsumsi Rapat pada Pelaksanaan Sosialisasi
- Spanduk pada Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi
- Perlengkapan Peserta pada Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi
- Honorarium Narasumber Pejabat Eselon III/yang disetarakan
- Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan desiminasi
- Transport lokal peserta pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan desiminasi
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Rekonsiliasi ke KPKNL
- Pembuatan Leaflet, Kalender, Poster, dan Papan Informasi
- Perjalanan Dinas Penyusunan Evaluasi Probis dan SOP
- Transport Lokal/Koordinasi Daerah UPT dan Satwas
- Konsumsi Rapat UPT dan Satwas
- Belanja Modal Mesin Potong Rumput
- Belanja Modal Lemari Arsip

- Belanja Modal Sofa
- Belanja Modal Meja Rapat
- Belanja Modal Kursi Rapat
- Perjalanan Dinas Assesment Calon Pejabat Struktural
- Perjalanan Dinas Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional dan Struktural
- Perjalanan Dinas Monev SDM-A
- Perjalanan Dinas Pindah Tugas Pegawai
- Perjalanan Dinas Uji Kompetensi Jabfung Pengawas Perikanan
- Perjalanan Dinas Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi PPNS
- Penggandaan dan Penjilidan RPD
- Penggandaan dan Penjilidan POK DIPA Awal
- Penggandaan dan Penjilidan Renstra UPT
- Penggandaan dan Penjilidan Renja UPT
- Penggandaan dan Penjilidan Kontrak Kinerja
- Perdin ke Kanwil
- Translok ke KPPN
- Penggandaan dan Penjilidan Laporan, Pembuatan Spanduk, Perlengkapan peserta dan panitia, Konsumsi Rapat pada Monev Lingkup UPT
- Pembuatan Laporan Tahunan, Pelaporan LKJ triwulan, Pelaporan LKJ tahunan
- Perdin Monev SMT I 2023
- Penggandaan dan Penjilidan Laporan Keuangan Triwulan, Semester, dan Tahunan
- Rekonsiliasi ke KPPN

- Perdin Workshop SAKIP
- Pembuatan Laporan Anjab, Laporan ABK, Laporan Evaluasi Jabatan, Laporan Evaluasi SOP
- Perlengkapan Peserta, Narasumber, Panitia; Konsumsi Kegiatan; Pengadaan Bahan/Quisioner/Survey; Pembuatan Spanduk dan Laporan pada Forum Konsultasi Publik (ESP dan SKM)
- Pembuatan Laporan Bulanan ZI, Banner, Penggandaan Bahan, Laporan, Pembuatan Spanduk
- Honor Penanggung Jawab, Ketua dan Anggota
- Honor Narasumber (Instansi Luar KKP)
- Perjalanan Dinas Penyusunan Evaluasi Jabatan
- Dinding Apresiasi Bulanan
- Biaya publikasi PILAR PSDKP
- Perdin menghadiri Bimtek GKM
- Perdin menghadiri Lomba Inovasi Ditjen. PSDKP – Tim
- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Inovasi
 Senilai Rp1.593.020.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*) menjadi *Automatic Adjustment (AA)*.
- Revisi DIPA ke-2 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan beberapa

perubahan anggaran, antara lain;

1. Penghapusan detil anggaran Blanko Persuratan Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp2.400.000,00;
2. Penghapusan detil anggaran Blanko Persuratan Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp2.400.000,00;
3. Blanko Persuratan Satwas SDKP Nabire sebesar Rp2.400.000,00;
4. Pengurangan pagu anggaran Listrik Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp12.000.000,00;
5. Penambahan pagu anggaran Telepon dan Internet Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp39.600.000,00;
6. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Laptop sebesar Rp7.130.000,00;
7. Pengurangan pagu anggaran pemeliharaan Televisi sebesar Rp1.000.000,00;
8. Penambahan pagu anggaran Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp35.040.000,00;
9. Penghapusan detil anggaran Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp13.320.000,00;
10. Pengurangan pagu anggaran Seragam PDH KKP sebesar Rp33.930.000,00;
11. Penghapusan detil anggaran Perjalanan Dinas Assesment Calon Pejabat Struktural sebesar Rp10.420.000,00;
12. Penambahan detil anggaran Perjalanan

Dinas Pindah Tugas Pegawai sebesar Rp10.420.000,00;

13. Pengurangan pagu anggaran Konsumsi Rapat dalam Rangka Perencana Operasi Speedboat sebesar Rp1.432.000,00;

14. Penghapusan detil anggaran Penjilidan Laporan Rapat Perencanaan sebesar Rp1.000.000,00;

15. Penghapusan detil anggaran Penjilidan Laporan Hasil Operasi Speedboat sebesar Rp1.000.000,00;

16. Penghapusan detil anggaran Air Bersih sebesar Rp240.000,00;

17. Penambahan detil anggaran Biaya Angkut BBM Dolphin 016 sebesar Rp3.672.000,00;

18. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp4.500.000,00;

19. Penambahan pagu anggaran Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp4.500.000,00;

20. Pengurangan pagu anggaran Perdin Dalam Rangka Pengendalian Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp99.853.000,00;

21. Penambahan detil anggaran Pengawasan Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp99.853.000,00;

22. Penambahan detil anggaran Sewa Perahu

- Motor SDKP Nabire sebesar Rp6.000.000,00;
23. Penambahan pagu anggaran Perdin Pengawasan Destructive Fishing Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp2.660.000,00;
 24. Penambahan detil anggaran Perdin Pengawasan Destructive Fishing Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp2.760.000,00;
 25. Penambahan detil anggaran Perdin Pengawasan Destructive Fishing Satwas SDKP Nabire sebesar Rp2.300.000,00;
 26. Penghapusan detil anggaran Translok Pengawasan Destructive Fishing Stasiun PSDKP Biak, Jayapura, Manokwari dan Nabire serta Translok koordinasi dengan instansi terkait sebesar Rp12.000.000,00;
 27. Pengurangan pagu anggaran Perdin Pengawasan Tindak Lanjut sebesar Rp1.840.000,00;
 28. Penambahan pagu anggaran Perlengkapan Peserta dan Panitia pada Sosialisasi kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebesar Rp120.000,00;
- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2023 dengan beberapa perubahan anggaran, antara lain;
 1. Penambahan detil anggaran Paket Video Conference sebesar Rp2.526.000,00;
 2. Penambahan detil anggaran Paket E-Drive sebesar Rp1.500.000,00;
 3. Pengurangan pagu anggaran Listrik

- Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp1.976.000,00;
4. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp2.050.000,00;
 5. Penambahan pagu anggaran Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi TPKP di Daerah sebesar Rp2.144.000,00;
 6. Penghapusan detail anggaran dokumentasi dan sertifikat Rapat Koordinasi TPKP di Daerah sebesar Rp1.894.000,00;
 7. Pengurangan pagu anggaran plakat dan Penggandaan bahan rapat koordinasi sebesar Rp250.000,00;
 8. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Rencana Pengawasan UPT PSDKP sebesar Rp1.000.000,00;
 9. Penambahan pagu anggaran Konsumsi Rapat Perencanaan Pengawasan perikanan dengan instansi lain sebesar Rp1.000.000,00;
 10. Penambahan pagu anggaran Paket Video Conference sebesar Rp20.000,00;
 11. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp20.000,00;
 12. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi penerapan sanksi Administratif ke pusat sebesar Rp19.815.000,00;

13. Penambahan detil anggaran Perjalanan dinas dalam rangka coaching clinic PPNS bidang kelautan dan perikanan sebesar Rp19.815.000,00;
 14. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP sebesar Rp68.000.000,00;
 15. Penambahan detil anggaran Seragam PDL AKP, Sepatu PDL AKP, dan T-Shirt AKP sebesar Rp68.000.000,00;
 16. Penambahan pagu dan perubahan detil anggaran Konsumsi Rapat Perencanaan/ Persiapan Pengawasan menjadi Paket Meeting Halfday sebesar Rp3.900.000,00;
 17. Penambahan detil anggaran Spanduk sebesar Rp1.100.000,00;
 18. Penghapusan detil anggaran Pembuatan Papan Informasi Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp5.000.000,00;
 19. Penambahan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp29.570.000,00;
 20. Pengurangan pagu anggaran Listrik Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp26.000.000,00;
 21. Penambahan pagu anggaran Listrik Satwas SDKP Jayapura, Manokwari, dan Nabire sebesar Rp26.000.000,00;
 22. Pengurangan pagu anggaran Pengadaan Seragam Pegawai sebesar Rp29.570.000,00.
- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 20

Maret 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain :

1. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP sebesar Rp8.000.000,00;
2. Penambahan detil anggaran Atribut Tambahan AKP sebesar Rp8.000.000,00;
3. Pengurangan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp10.000.000,00;
4. Penambahan detil anggaran Sewa Kendaraan Insidentil sebesar Rp10.000.000,00:
 - Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan pada tanggal 4 April 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain :
 1. Penambahan pagu anggaran Sepatu PDL AKP sebesar Rp4.098.000,00;
 2. Pengurangan pagu anggaran T-Shirt AKP sebesar Rp4.098.000,00;
 3. Penghapusan detil anggaran Sepatu PDL Pengawas Perikanan sebesar Rp5.330.000,00;
 4. Penambahan pagu anggaran Sepatu PDL Polsus WP3K sebesar Rp5.330.000,00.
 - Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pengurangan pagu anggaran Sepatu PDL AKP sebesar Rp4.098.000,00;
 2. Penambahan pagu anggaran T-Shirt AKP sebesar Rp4.098.000,00;
 3. Penambahan pagu anggaran Belanja

- Tunjangan Suami/Istri (ke-14) sebesar Rp398.000,00;
4. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Anak (ke-14) sebesar Rp165.000;
 5. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Fungsional (ke-14) sebesar Rp130.000,00;
 6. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS (ke-14) sebesar Rp693.000,00;
 7. Penambahan pagu anggaran Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 Pengangkut Logistik Kapal Pengawas sebesar Rp268.000,00;
 8. Pengurangan pagu anggaran Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp268.000,00;
- Revisi DIPA ke-7 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Melakukan penghapusan detil anggaran:
 - Pengadaan Perangkat Pelayanan Publik
 - Konsumsi Rapat Pelaksanaan Sosialisasi
 - Perlengkapan Peserta Senilai Rp26.930.000,00 menjadi *Automatic Adjustment* (AA).
 - Revisi DIPA ke-8 dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Rencana Pengawasan UPT PSDKP sebesar Rp783.000,00;
 2. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pulbaket

- sebesar Rp783.000,00;
3. Pengurangan pagu anggaran Belanja Modal Sofa dan Video Conference sebesar Rp22.690.000,00;
 4. Penambahan pagu anggaran belanja modal Roller Blind dan Lemari Arsip sebesar Rp5.990.000,00;
 5. Penambahan detail anggaran Teropong sebesar Rp16.700.000,00;
 6. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas sebesar Rp6.000.000,00;
 7. Penambahan pagu anggaran Service perlengkapan navigasi dan komunikasi sebesar Rp6.000.000,00;
 8. Pengurangan pagu anggaran Perdin Rakernis sebesar Rp1.177.000,00;
 9. Pengurangan pagu anggaran Perdin Monev UPT sebesar Rp1.156.000,00;
 10. Pengurangan pagu anggaran Perdin Bimtek Penyusunan LKj sebesar Rp2.108.000,00;
 11. Pengurangan pagu anggaran Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II 2022 sebesar Rp3.775.000,00;
 12. Pengurangan pagu anggaran Workshop Penyusunan Laporan SPIP dan Manajemen Risiko sebesar Rp3.444.000,00;
 13. Pengurangan pagu anggaran Perdin Workshop SAKIP sebesar Rp11.000.000,00;
 14. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas

- Penyusunan ABK sebesar Rp10.000.000,00;
15. Penghapusan detil anggaran Perjalanan Dinas Penyusunan SKP 2023 sebesar Rp10.000.000;
 16. Penambahan detil anggaran Perlengkapan Peserta, Narasumber, Panitia; Paket Meeting Fullday; Pembuatan Spanduk; Translok Peserta pada kegiatan Forum Konsultasi Publik (ESP dan SKM) sebesar Rp42.660.000,00;
 17. Penambahan detil anggaran Honorarium Rohaniwan pada kegiatan Pengambilan Sumpah PNS sebesar Rp400.000,00.
- Revisi DIPA ke-9 dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Penambahan pagu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji Ke 13) sebesar Rp2.472.000,00;
 2. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Suami/Istri (ke-13) sebesar Rp871.000,00;
 3. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Anak (ke-13) sebesar Rp281.000,00;
 4. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Fungsional (ke-13) sebesar Rp130.000,00
 5. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS (ke-13) sebesar Rp3.754.000,00;
 6. Penambahan pagu anggaran Perpanjangan

STNK Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp81.000,00;

7. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp81.000,00;
8. Pengurangan pagu anggaran Perdin Monev Satwas sebesar Rp3.998.000,00;
9. Pengurangan pagu anggaran Bimtek Pengelolaan PNBPNP sebesar Rp124.000,00;
10. Pengurangan pagu anggaran Perlengkapan Peserta, Narasumber, Panitia sebesar Rp4.620.000,00;
11. Penambahan pagu anggaran Paket Meeting Fullday sebesar Rp8.400.000,00;
12. Penambahan pagu anggaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp342.000,00.
13. Pengurangan pagu anggaran Honor Petugas Kebersihan/Pramubakti Stasiun dan Satwas sebesar Rp2.475.000,00;
14. Penambahan pagu anggaran Seragam Upacara Pengawas Perikanan sebesar Rp2.125.000,00;
15. Penambahan pagu anggaran Sepatu Upacara Pengawas Perikanan sebesar Rp350.000,00;
- Revisi DIPA ke-10 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pengurangan pagu anggaran perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis pengawasan SDKP sebesar Rp1.155.000,00;
 2. Penambahan detail anggaran sertifikasi ahli

- nautika penangkapan ikan I sebesar Rp585.000,00;
3. Penambahan detil anggaran sertifikasi ahli teknik penangkapan ikan I sebesar Rp570.000,00;
 4. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp16.990.000,00;
 5. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan sebesar Rp16.990.000,00;
- Revisi DIPA ke-11 dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pemindahan anggaran antar satker pada KRO Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (2350.QDD) ke Pangkalan PSDKP Tual sebesar Rp54.570.000,00;
 2. Penghapusan anggaran yang ditagging AA sebesar Rp843.020.000,00;
 - Revisi DIPA ke-12 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas sebesar Rp22.563.000,00;
 2. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Perawatan Preventif Kapal Pengawas sebesar Rp16.202.000,00;
 3. Penambahan detil anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Perawatan Darurat

- Speedboat Pengawas sebesar Rp6.361.000,00;
4. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Rekonsiliasi BMN SMT II 2022 dan Semester I 2023 sebesar Rp4.812.000,00;
 5. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp82.290.000,00;
 6. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan sebesar Rp36.750.000,00;
 7. Pengurangan pagu anggaran Perdin Workshop Data sebesar Rp40.728.000,00;
 8. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Ujian Dinas Kenaikan Pangkat/Penyesuaian Ijazah sebesar Rp17.514.000,00;
 9. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Uji Kompetensi Jabfung Pengawas Perikanan sebesar Rp11.000.000,00;
 10. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pindah Tugas Pegawai sebesar Rp28.514.000,00;
 11. Penambahan pagu anggaran Perdin Ratekcan sebesar Rp2.931.000,00;
 12. Penambahan pagu anggaran Perdin Finalisasi sebesar Rp2.203.000,00;
 13. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I 2023 sebesar Rp3.857.000,00;
 14. Pengurangan pagu anggaran Perdin Workshop SAKIP sebesar Rp1.277.000,00;
 15. Penghapusan detil anggaran BBM Sea Rider dan Rubber Boat sebesar Rp4.230.000,00;

16. Pengurangan pagu anggaran Daftar arus pasang surut sebesar Rp350.000,00;
17. Pengurangan pagu anggaran Pengadaan Peta Laut sebesar Rp5.000.000,00;
18. Pengurangan pagu anggaran Biaya Langganan Listrik Darat Kapal Pengawas sebesar Rp3.021.000,00;
19. Pengurangan pagu anggaran Seragam PDL AKP sebesar Rp873.000,00;
20. Pengurangan pagu anggaran Sepatu PDL AKP sebesar Rp151.000,00;
21. Pengurangan pagu anggaran T-Shirt AKP sebesar Rp908.000,00;
22. Pengurangan pagu anggaran Atribut Tambahan AKP sebesar Rp67.000,00;
23. Penambahan pagu anggaran Pelaksanaan medical check up AKP Hiu Macan 04 sebesar Rp14.600.000,00;
24. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas sebesar Rp30.000.000,00;
25. Penambahan pagu anggaran Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp30.000.000,00;
26. Pengurangan pagu anggaran Konsumsi Rapat Perencanaan Pengawasan Konservasi sebesar Rp1.840.000,00;
27. Penambahan detail anggaran Seragam PDL Polsus WP3K sebesar Rp10.176.000,00;
28. Penambahan detail anggaran Sepatu PDL Polsus

- WP3K sebesar Rp3.654.000,00;
29. Penambahan pagu anggaran Perdin Konsultasi Perencanaan Pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Pusat sebesar Rp22.672.000,00;
 30. Pengurangan pagu anggaran Sewa Perahu Motor dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan dan laporan masyarakat sebesar Rp5.000.000,00;
 31. Pengurangan pagu anggaran Perdin Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Laporan Masyarakat sebesar Rp1.840.000,00;
 32. Pengurangan pagu anggaran Perdin Pengawasan pemanfaatan ruang laut Luar Kota sebesar Rp3.022.000,00;
 33. Penghapusan detil anggaran Sewa perahu motor sebesar Rp10.000.000,00;
 34. Pengurangan pagu anggaran Perdin Pengawasan Jenis Ikan Yang di Lindungi sebesar Rp1.840.000,00;
 35. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar sebesar Rp9.280.000,00;
 36. Pengurangan pagu anggaran Konsumsi Rapat Evaluasi Pengawasan Konservasi sebesar Rp2.760.000,00;
 37. Pengurangan pagu anggaran Konsumsi Rapat Evaluasi Pengawasan Jenis Ikan sebesar Rp920.000,00;
 38. Pengurangan pagu anggaran Spanduk sebesar

- Rp794.000,00;
39. Pengurangan pagu anggaran Sewa Perahu Motor Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp5.000.000,00;
 40. Penambahan pagu anggaran Sewa Perahu Motor SDKP Manokwari sebesar Rp4.500.000,00;
 41. Penambahan pagu anggaran Sewa Perahu Motor SDKP Nabire sebesar Rp6.000.000,00;
 42. Pengurangan pagu anggaran Perdin Pengawasan Destructive Fishing Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp1.840.000,00;
 43. Penambahan pagu anggaran Perdin Pengawasan Destructive Fishing Satwas SDKP Nabire sebesar Rp2.300.000,00;
 44. Pengurangan pagu anggaran Sewa Perahu Motor Tindak Lanjut Pengawasan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp5.000.000,00;
 45. Pengurangan pagu anggaran Perdin Pengawasan Tindak Lanjut sebesar Rp1.840.000,00;
 46. Penambahan pagu anggaran ATK sebesar Rp284.000,00;
 47. Penambahan detil anggaran Konsumsi Kegiatan Bersih Pantai sebesar Rp1.500.000,00;
 48. Penambahan detil anggaran Spanduk sebesar Rp190.000,00;
 49. Pengurangan pagu anggaran Translok Koordinasi ke Instansi Terkait sebesar Rp300.000,00;
 50. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas

- dalam rangka Penyusunan Rencana Pengawasan UPT PSDKP sebesar Rp233.000,00;
51. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pulbaket Rp10.156.000,00;
 52. Penghapusan detil anggaran Transport Lokal Dalam Rangka Pulbaket sebesar Rp2.400.000,00;
 53. Penghapusan detil anggaran Transport lokal Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp600.000,00;
 54. Penghapusan detil anggaran Transport lokal Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Jayapura sebesar Rp600.000,00;
 55. Penghapusan detil anggaran Transport lokal Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Manokwari sebesar Rp600.000,00;
 56. Penghapusan detil anggaran Transport lokal Pengawasan Perikanan Stasiun PSDKP Nabire sebesar Rp600.000,00;
 57. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas Menghadiri Perjalanan Dinas menghadiri rapat/sosialisasi/FGD/undangan di luar kantor sebesar Rp5.123.000,00;
 58. Penambahan pagu anggaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp5.000.000,00;
 59. Penghapusan detil anggaran Perjalanan Dinas Penyusunan Evaluasi Probis dan SOP sebesar Rp12.432.000,00;
 60. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp7.432.000;

61. Penambahan pagu anggaran Gaji Pokok PNS (ke-13) sebesar Rp1.266.000,00;
62. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Suami/Istri (ke-13) sebesar Rp115.000,00;
63. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Anak (ke-13) sebesar Rp41.000,00;
64. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Umum PNS (Ke-13) sebesar Rp15.000,00;
65. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp1.437.000,00;
66. Penghapusan detil anggaran Blanko Persuratan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp12.000.000,00;
67. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Printer sebesar Rp13.000.000,00;
68. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan CCTV sebesar Rp3.000.000,00;
69. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan AC Split sebesar Rp3.000.000,00;
70. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Alat Selam sebesar Rp200.000,00;
71. Penambahan detil anggaran Dalam Rangka Pisah Sambut Kepala UPT sebesar Rp25.200.000,00;
72. Pengurangan pagu anggaran Biaya Delegasi Operasi Speedboat 8m sebesar Rp3.990.000,00;
73. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Operasi

- Speedboat Pengawas sebesar Rp3.990.000,00;
74. Penghapusan detil anggaran Konsumsi Rapat Kegiatan Perencanaan sebesar Rp920.000,00;
 75. Pengurangan pagu anggaran Servis perlengkapan keselamatan sebesar Rp68.000,00;
 76. Penghapusan detil anggaran Transport Lokal Pengendalian Perawatan Darurat Speedboat Pengawas sebesar Rp1.200.000,00;
 77. Penambahan detil anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Perawatan Darurat Speedboat Pengawas sebesar Rp3.108.000,00;
 78. Penghapusan detil anggaran Konsumsi Rapat Kegiatan Monev sebesar Rp920.000,00;
 79. Penghapusan detil anggaran ATK sebesar Rp500.000,00;
 80. Penghapusan detil anggaran Bahan Komputer sebesar Rp500.000,00;
 81. Penghapusan detil anggaran Konsumsi rapat persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp2.760.000,00;
 82. Penambahan pagu anggaran Plakat sebesar Rp510.000,00;
 83. Pengurangan pagu anggaran Penggandaan bahan rapat koordinasi sebesar Rp230.000,00;
 84. Penghapusan detil anggaran Honor narasumber eselon II (Eksternal Eksternal KKP) sebesar Rp2.000.000,00;
 85. Penambahan pagu anggaran Honor narasumber eselon III (Eksternal KKP) sebesar Rp900.000,00;

86. Pengurangan pagu anggaran Honor moderator (Eksternal KKP) sebesar Rp1.000.000,00;
87. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan dinas narasumber/peserta pusat sebesar Rp5.170.000,00;
88. Penghapusan detil anggaran Transportasi Peserta sebesar Rp4.500.000,00;
89. Penghapusan detil anggaran Transportasi lokal Dalam Rangka Koordinasi Dengan Instansi Terkait sebesar Rp3.600.000,00;
90. Penambahan detil anggaran Sewa Kendaraan Insidentil sebesar Rp3.450.000,00;
91. Penambahan detil anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi TPKP di Daerah sebesar Rp15.400.000,00;
92. Penambahan pagu anggaran Sepatu PDL Polsus WP3K sebesar Rp1.688.000,00;
93. Pengurangan pagu anggaran Perdin Konsultasi Perencanaan Pemeriksaan kepatuhan unit usaha SDK ke Pusat sebesar Rp1.688.000,00;
94. Pengurangan pagu anggaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp520.000,00;
95. Penambahan pagu anggaran Pembuatan Foto Pimpinan sebesar Rp520.000,00;
96. Penambahan pagu anggaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp31.160.000,00;
97. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp242.173.000,00;
98. Penambahan pagu anggaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK sebesar Rp120.493.000,00;

99. Penambahan pagu anggaran Pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp90.520.000,00;
100. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Komputer sebesar Rp2.462.000,00;
101. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Laptop sebesar Rp2.783.000,00;
102. Penambahan pagu anggaran Atribut Seragam Kepala UPT sebesar Rp2.783.000,00;
103. Penambahan pagu anggaran Seragam Olahraga PSDKP sebesar Rp422.000,00;
104. Penambahan pagu anggaran Dalam Rangka Pisah Sambut Kepala UPT sebesar Rp1.000.000,00;
105. Penambahan pagu anggaran Sewa baju adat dalam rangka pisah sambut kepala UPT sebesar Rp1.040.000,00;
106. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Penyusunan ABK sebesar Rp1.200.000,00;
107. Penambahan pagu anggaran Honorarium Rohaniwan sebesar Rp1.200.000,00;
108. Pengurangan pagu anggaran Servis perlengkapan keselamatan sebesar Rp8.380.000,00;
109. Penghapusan detil anggaran Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta sebesar Rp2.280.000,00;
110. Pengurangan pagu anggaran Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas sebesar

- Rp11.450.000,00;
111. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Perawatan Darurat Kapal Pengawas sebesar Rp3.551.000,00;
 112. Penghapusan detil anggaran Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp3.600.000,00;
 113. Pengurangan pagu anggaran Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar sebesar Rp690.000,00;
 114. Pengurangan pagu anggaran Pengadaan Suku Cadang dan Perlengkapan Speedboat Pengawas Dolphin 016 sebesar Rp17.971.000,00;
 115. Penghapusan detil anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengendalian Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp22.379.000,00;
 116. Pengurangan pagu anggaran Pengawasan Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp341.000,00;
 117. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Darurat Speedboat Pengawas Dolphin 016 sebesar Rp5.276.000,00;
 118. Penambahan pagu anggaran Perawatan Darurat Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp75.918.000,00;
 119. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional dan Struktural sebesar Rp1.200.000,00;

120. Penambahan pagu anggaran Honorarium Rohaniwan sebesar Rp1.200.000,00;
121. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Penyusunan ABK sebesar Rp1.200.000,00;
122. Penghapusan detil anggaran Honorarium Rohaniwan sebesar Rp1.200.000,00;
123. Penambahan belanja pegawai untuk PPPK sebesar Rp293.940.000,00.

- Revisi DIPA ke 13 dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:

1. Pengurangan pagu anggaran Bahan Bakar Minyak Kapal Pengawas sebesar Rp150.000.000,00;
 2. Penambahan detil anggaran Dukungan Operasional Kapal Pengawas sebesar Rp100.000.000,00;
 3. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Teknis SDKP sebesar Rp50.000.000,00;
 4. Pengurangan pagu anggaran Konsumsi Rapat Dalam Rangka Perencana Operasi Speedboat sebesar Rp2.502.000,00;
1. pagu anggaran Pelumas speedboat 8 meter sebesar Rp3.665.000,00;
 2. Pengurangan anggaran Biaya Delegasi speedboat 8 meter sebesar Rp1.001.00,00;
 3. Pengurangan pagu anggaran Seragam PDL Polsus

- WP3K Sebesar Rp1.726.000,00;
4. Penambahan pagu anggaran Perdin Konsultasi Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha SDK ke Pusat Sebesar Rp3.566.000,00;
 5. Pengurangan detil Konsumsi Rapat Evaluasi Pengawasan Jenis Ikan sebesar Rp920.000,00;
 6. Pengurangan detil Konsumsi Rapat Evaluasi Pengawasan WP3K sebesar Rp920.000,00;
 7. Penambahan pagu anggaran Pengawasan Destructive Fishing Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp5.980.000,00;
 8. Pengurangan pagu anggaran Sewa Perahu Motor Tindak Lanjut Pengawasan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp4.140.000,00;
 9. Penghapusan detil Perdin Pengawasan Tindak Lanjut sebesar Rp1.840.000,00;
 10. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pulbaket sebesar Rp2.171.000,00;
 11. Penambahan pagu anggaran Perdin Eselon III ke Bawah Kegiatan Monev Capaian Kinerja Pengawasan sebesar Rp2.171.000,00;
 12. Pengurangan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp2.797.000,00;
 13. Pengurangan pagu anggaran Sewa Perahu Motor Tindak Lanjut Pengawasan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp4.140.000,00;
 14. Penghapusan detil Perdin Pengawasan Tindak Lanjut sebesar Rp1.840.000,00;
 15. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam

- Rangka Pulbaket sebesar Rp2.171.000,00;
16. Penambahan pagu anggaran Perdin Eselon III ke Bawah Kegiatan Monev Capaian Kinerja Pengawasan sebesar Rp2.171.000,00;
 17. Pengurangan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp2.797.000,00;
 18. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Printer sebesar Rp5.582.000,00;
 19. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Komputer sebesar Rp8.341.000,00;
 20. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Laptop sebesar Rp5.410.000,00;
 21. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan CCTV sebesar Rp22.130.000,00;
- Revisi DIPA ke 14 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Penghapusan detail Anggaran yang memiliki tagging AA Sebesar Rp750.000.000,00;
 - Revisi DIPA ke 15 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Pengurangan pagu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.900.000,00;
 2. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Suami/Istri sebesar Rp678.000,00;
 3. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Anak sebesar Rp220.000,00;
 4. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan PNS sebesar Rp65.000.000,00;

5. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Sebesar Rp50.000,00;
6. Pengurangan pagu anggaran Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp710.000,00;
7. Pengurangan pagu anggaran Uang Lembur Gol. II sebesar Rp7.650.000,00;
8. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan II sebesar Rp10.500.000,00;
9. Pengurangan pagu anggaran Uang Lembur Golongan III sebesar Rp24.000.000,00;
10. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan III sebesar Rp20.350.000,00;
11. Pengurangan pagu anggaran Uang Lembur Golongan IV sebesar Rp1.250.000,00;
12. Pengurangan pagu anggaran Uang makan Lembur Golongan IV sebesar Rp1.025.000,00;
13. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinreja PNS sebesar Rp30.901.000,00;
14. Penambahan pagu anggaran Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp1000,00;
15. Pengurangan pagu anggaran Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp2.535.000,00;
16. Pengurangan pagu anggaran Belanja Uang Makan PPPK Sebesar Rp18.107.000,00;
17. Pengurangan pagu anggaran Belanja Lembur PPPK Golongan V dan VII sebesar Rp1000.000,00;
18. Pengurangan Pagu anggaran Belanja Uang Makan Lembur PPPK Golongan V dan VII sebesar Rp1000.000,00;
19. Pengurangan pagu anggaran Belanja Uang Lembur

- PPPK Golongan IX sebesar Rp2.500.000,00;
20. Pengurangan pagu anggaran Belanja Uang Makan Lembur PPPK Golongan IX sebesar Rp1000.000,00;
 21. Pengurangan pagu anggaran Pembayaran Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp4.857.000,00;
 22. Penambahan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar
 23. Rp33.140.000,00;
 24. Penambahan pagu anggaran Perpanjangan STNK Roda 2 Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp74.000.000,00;
 25. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan Laptop sebesar Rp.357.000,00;
 26. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan CCTV sebesar Rp2000.000,00;
 27. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp4000.000,00;
 28. Penambahan pagu anggaran Seragam Olahraga PSDKP sebesar Rp43.200.000,00;
 29. Penambahan detail Seragam PDL AKP Sebesar Rp1.272.000,00;
 30. Penambahan detail Seragam PDL AKP Sebesar Rp1.448.000,00;
 31. Penambahan detail Pakaian Dinas Upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan sebesar Rp50.880.000,00
 32. Penambahan detail Sepatu Dinas Upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan sebesar Rp22.968.000,00;
 33. Penambahan detail Sepatu Olahraga sebesar Rp36.000.000,00;

- Revisi DIPA ke 16 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan beberapa perubahan anggaran antara lain:
 1. Penghapusan anggaran pada KRO Fasilitasi dan Bimbingan Kelompok Masyarakat Pengawas sebesar Rp20.430.000,00;
- Revisi DIPA ke 17 dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 dengan beberapa perubahan antara lain ;
 1. Pengurangan pagu anggaran Air Bersih (1 Unit Kapal) Sebesar Rp24.300.000,00;
 2. Pengurangan pagu anggaran Pelumas (1 Unit Kapal) sebesar Rp16.622.000,00;
 3. Pengurangan pagu anggaran Biaya Angkut BBM (1 Unit Kapal) sebesar Rp49.439.000,00;
 4. Pengurangan pagu anggaran Pelaporan Hasil Operasi (1 Unit Kapal) sebesar Rp5000.000,00;
 5. Pengurangan pagu anggaran Bahan Komputer untuk Kapal Pengawas (1 Unit Kapal) sebesar Rp8.217.000,00;
 6. Pengurangan pagu anggaran ATK Untuk Kapal Pengawas (1 Unit Kapal) sebesar Rp5.078.000,00;
 7. Pengurangan pagu anggaran Pengadaan Peta Laut sebesar Rp1.091.000,00;
 8. Penambahan pagu anggaran Biaya Langganan Listrik Darat Kapal Pengawas sebesar Rp2.703.000,00;
 9. Penambahan pagu anggaran Jamuan Tamu di Kapal Pengawas sebesar Rp3000.000,00;
 10. Pengurangan pagu anggaran Belanja Bahan Makanan AKP (Natura) sebesar Rp.77.811.000,00;

11. Pengurangan pagu anggaran Uang Jaga Sandar Kapal Hiu Macan 04 sebesar Rp19.068.000,00;
12. Pengurangan pagu anggaran Biaya Delegasi KP. Hiu Macan 04 sebesar Rp154.485.000,00;
13. Penambahan pagu anggaran Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP sebesar Rp332.192.000,00;
14. Penambahan detil Dalam Rangka Koordinasi Pengelolaan Aset Kapal Pengawas sebesar Rp26.296.000,00;
15. Pengurangan pagu anggaran Medical Check Up AKP Hiu Macan 04 sebesar Rp1000.000,00;
16. Pengurangan pagu anggaran Sertifikasi Ahli Teknik Penangkapan Ikan I sebesar Rp40.000.000,00;
17. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Speedboat 8 meter sebesar Rp222.000,00;
18. Penambahan pagu anggaran Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Operasi Speedboat Pengawas sebesar Rp5.502.000,00;
19. Pengurangan pagu anggaran Air Bersih Speedboat 12 Meter sebesar Rp150.000,00;
20. Pengurangan pagu anggaran Biaya Delegasi Speedboat 12 meter sebesar Rp5.130.000,00;
21. Penambahan Detil Perawatan Rutin Bulanan Speedboat Pengawas Napoleon 041 sebesar Rp500.000,00;
22. Pengurangan pagu anggaran Perawatan Darurat Speedboat Pengawasan Napoleon 041 sebesar Rp500.000,00;
23. Penghapusan detil Honorarium Narasumber Rapat

- Gelar Perkara Setara Eselon III sebesar Rp9000.000,00;
24. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Penerapan Sanksi Administrasi ke Pusat sebesar Rp10.524.000,00;
 25. Penambahan detil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Administratif sebesar Rp13.337.000,00;

 26. Penambahan Detil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsolidasi Teknis dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif sebesar Rp6.187.000,00;
 27. Pengurangan pagu anggaran Seragam Polsus WP3K sebesar Rp1.151.000,00;
 28. Penambahan pagu anggaran Sepatu PDL Polsus WP3K sebesar Rp1.155.000,00;
 29. Penambahan pagu anggaran perdin Konsultasi Perencanaan Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha SDK ke Pusat sebesar Rp8.676.000,00;
 30. Penghapusan detil Sewa Perahu Motor Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasi Pengawasan dan Laporan Masyarakat sebesar Rp5.000.000,00;
 31. Penghapusan detil Perdin Tindak Lanjut hasil Pengawasan dan Laporan Masyarakat sebesar Rp1.840.000,00;
 32. Penambahan pagu anggaran Perdin Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Luar Kota sebesar Rp11.880.000,00;
 33. Penghapusan detil perdin Perdin Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi sebesar Rp1.840.000,00;

34. Pengurangan pagu anggaran Dalam Rangka Pengawasan Pengelolaan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar sebesar Rp11.880.000,00;
35. Penghapusan detil Sewa Perahu Motor Tindak Lanjut Pengawasan Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp188.000,00;
36. Penghapusan detil ATK sebesar Rp.500.000,00;
37. Penambahan pagu anggaran Konsumsi Kegiatan Sosialisasi sebesar Rp1.440.000,00;
38. Pengurangan pagu anggaran Perlengkapan Peserta dan Panitia sebesar Rp1.262.000,00;
39. Penghapusan detil Translok Koordinasi Instansi Terkait Rp.300.000,00;
40. Penambahan detil Konsumsi Rapat Evaluasi Pengawasan Destructive Fishing sebesar Rp900.000,00;
41. Pengurangan pagu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS Sebesar Rp377.000,00;
42. Pengurangan anggaran Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp5000,00;
43. Pengurangan pagu anggaran Belanja Tunjangan Suami/Istri sebesar Rp568.000,00;
44. Pengurangan pagu anggaran Belanja Tunjangan anak sebesar Rp125.000,00;
45. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Fungsional sebesar Rp960.000,00;
46. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Pph PNS Sebesar Rp123.000,00;
47. Pengurangan pagu anggaran Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp72.000,00;

48. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan III sebesar Rp2.886.000,00;
49. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan IV sebesar Rp2.950.000,00;
50. Penambahan pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp878.000,00;
51. Pengurangan pagu anggaran ATK Stasiun PSDK Biak sebesar Rp135.000,00;
52. Penambahan pagu anggaran ATK Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp358.000,00;
53. Penambahan pagu anggaran Komputer Supplies Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp500.000,00;
54. Pengurangan pagu anggaran Listrik Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp102.000,00;
55. Penghapusan detil pemeliharaan Kamera Bawah laut sebesar Rp1.286.000,00;
56. Penghapusan deti Pemeliharaan Kamera Digital sebesar Rp643.000,00;
57. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan Laptop sebesar Rp2.247.000,00;
58. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan AC Split sebesar Rp357.000,00;
59. Pengurangan pagu anggaran pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp858.000,00;
60. Penghapusan detil Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp1.480.000,00;
61. Pengurangan pagu anggaran Atribut Seragam Kepala UPT sebesar Rp3000,00;
62. Pengurangan pagu anggaran Seragam Olahraga PSDKP sebesar Rp947.000,00;

63. Penghapusan detil Seragam PDK AKP sebesar Rp1.272.000,00;
64. Penghapusan detil Sepatu PDL AKP sebesar Rp1.448.000,00;
65. Penambahan pagu anggaran Seragam Pengawas Perikanan sebesar Rp1.774.000,00;
66. Pengurangan pagu anggaran Pakaian Dinas Upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan sebesar Rp8.544.000,00;
67. Penambahan pagu anggaran Sepatu Dinas Upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan Rp.1000,00;
68. Penambahan pagu anggaran Atribut Pakaian Dinas Upacara Awak Kapal Pengawas Perikanan sebesar Rp8.623.000,00;
69. Penambahan pagu anggaran Baret Pengawas Perikanan sebesar Rp495.00,00;
70. Pengurangan pagu anggaran Sepatu Olahraga sebesar Rp193.000,00;
71. Penambahan pagu anggaran Seragam PDH (Merah Maron) PPPK dan Ka.UPT sebesar Rp929.000,00;
72. Penambahan pagu anggaran Seragam PDH (Putih) PPPK dan Ka.UPT sebesar Rp749.000,00;
73. Pengurangan Pagu Anggaran Perdin Finaliasai sebesar Rp9.297.000,00;
74. Penambahan detil Perdin Pemantapan DIPA 2024 sebesar Rp20.085.000,00;
75. Pengurangan pagu anggaran Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan TW III 2023 sebesar Rp9.873.000,00;
76. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam

Rangka Monev Pelayanan Sebesar Rp915.000,00;

- Revisi DIPA ke 18 dilaksanakan pada tanggal 28 November 2023 dengan beberapa perubahan antara lain;

1. Penghapusan anggaran pada RO Perkara TPKP Sedang yang ditangani sebesar Rp138.150.000,00;
2. Penghapusan detil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Teknis dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Adimisstratif sebesar Rp6000.000,00;

3. Penambahan Pagu anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp100.000.000,00;

- Revisi DIPA ke 19 dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 dengan beberapa perubahan antara lain;

1. Pengurangan pagu anggaran Pembuatan Spanduk sebesar Rp14.000,00;
2. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp9.581.000,00;
3. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan sebesar Rp9.581.000,00;
4. Penambahan pagu anggaran Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp11.697.000,00;
5. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Suami Istri sebesar Rp1.169.000,00;
6. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan anak sebesar Rp468.000,00;
7. Pengurangan pagu Anggaran Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp17.012.000,00;
8. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan II sebesar Rp24.769.000,00;

9. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan II Sebesar Rp8.575.000,00;
10. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan III sebesar Rp11.680.000,00;
11. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan III sebesar Rp17.020.000,00;
12. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan IV sebesar Rp2.300.000,00;
13. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan IV sebesar Rp2.583.000,00;
14. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PNS sebesar Rp3.495.000,00;
15. Pengurangan pagu anggaran Belanja Uang Makan PPPK sebesar Rp14.036.000,00;
16. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur PPPK Golongan V dan VII sebesar Rp4.785.000,00;
17. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur PPPK Golongan V dan VII sebesar Rp2.035.000,00;
18. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur PPPK Golongan IX sebesar Rp10.660.000,00;
19. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur PPPK Golongan IX sebesar Rp2.753.000,00;
20. Pengurangan pagu anggaran Tunjangan Kinerja PPPK sebesar Rp19.000,00;
21. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur PPNPN sebesar Rp1.794.000,00;
22. Pengurangan pagu anggaran Uang Makan Lembur PPNPN sebesar Rp1.800.000,00;
23. Pengurangan pagu anggaran Listrik Satwas SDKP Jayapura sebesar Rp3000,00;

24. Penambahan pagu anggaran pemeliharaan Printer sebesar Rp289.000,00;
25. Pengurangan pagu pemeliharaan Printer sebesar Rp260.000,00;
26. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Satwas SDKP Manokwari sebesar Rp1000,00;
27. Pengurangan pagu anggaran Belanja Jasa Pengemudi Operasional sebesar Rp3000,00;
28. Pengurangan pagu anggaran Makana Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp2000,00;
29. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monev Pelayanan sebesar Rp7.482.000,00;
30. Penghapusan detil Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lomba Inovasi sebesar Rp7.482.000,00;
- Revisi DIPA ke 20 dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan beberapa perubahan antara lain;
 1. Pengurangan pagu anggaran Jamuan Tamu di Kapal Pengawas sebesar Rp300.000,00;
 2. Penambahan pagu anggaran Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pengawasan SDKP sebesar Rp300.000,00;
 3. Penambahan pagu anggaran Perjalanan Dinas Undangan/Bimtek/Koordinasi sebesar Rp13.979.000,00;
 4. Pengurangan pagu anggaran Perjalanan Dinas Pimpinan sebesar Rp13.979.000,00;
 5. Penambahan pagu anggaran Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp9000,00;

6. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan II sebesar Rp19.193.000,00;
7. Penambahan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan II sebesar Rp980.000,00;
8. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur Golongan III sebesar Rp13.700.000,00;
9. Penambahan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan III sebesar Rp2.701.000,00;
10. Penambahan pagu anggaran Uang Lembur golongan IV sebesar Rp1.475.000,00;
11. Penambahan pagu anggaran Uang Makan Lembur Golongan IV sebesar Rp328.000,00;
12. Pengurangan pagu anggaran Telepon dan Internet Satwas SDKP Nabire sebesar Rp.87.000,00;
13. Pengurangan pagu anggaran Air Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp96.000,00;
14. Penambahan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pengangkut Logistik Kapal sebesar Rp500.000,00;
15. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pimpinan sebesar Rp300.000,00;
16. Pengurangan pagu anggaran Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Stasiun PSDKP Biak sebesar Rp17.000,00;

*Realisasi
Pendapatan
Rp14.258.53
8,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.258.538,00 dan Rp36.398.584,00. Pendapatan (Pendapatan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2023 adalah pendapatan yang diperoleh dari beberapa jenis pendapat sebagai berikut:

A. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.487.608,00 terdiri dari :

1. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A .
2. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Februari 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 003A .
3. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 046A Stasiun PSDKP Biak |Laporan Keuangan Semester I TA 2023
4. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T
5. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Mei 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 133A
6. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Juni 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 176A

7. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Juli 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 235
 8. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Agustus 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 290
 9. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 342
 10. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Oktober 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 371
 11. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 421
 12. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 488
- B. Pendapatan dari penjualan peralatan & mesin sebesar Rp1.569.930,00 dengan rincian:
- penjualan satu paket inventaris kantor berupa 2 unit penghancur kertas merk Shredstar S5, 3 unit Handy Talky (HT) merk Kenwood, 2 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 1 unit Water Jet Ejector merk Sanchin, 1 unit Digital Video Effect merk Olympus - Tough, 1 unit Camera Digital merk Nikon - Waterproof, 6 unit lap top merk

Toshiba, 1 unit Tablet PC merek Samsung Galaxy, 1 unit A.C. split merk Sharp, dan 2 unit P.C Unit merk Asus dan Lenovo dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp739.254,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 10/85/2023 tanggal 14 Februari 2023, dan bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 9D38761QUQBJB92G;

- Penjualan satu paket inventaris kantor berupa 1 unit Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) merk ACHILLES TYPE SGX 132, 2 unit Water Quality Checker merk Hanna, 300 unit Peta merk Standar Hidros, dan 3 unit A.C. Split merk Polytron dan Panasonic dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp455.686,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 23/85/2023 tanggal 21 Maret 2023, dan bukti Penerimaan Negara dengan NTPN C2A3D7QLUFJ04QVM; dan

- Penjualan satu unit Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) merk Silingger dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp374.990,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 65/85/2023 tanggal 20 Juni 2023, dan bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 277432G4VGEAGNU8

C. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Rp.3.201.000,00 :

Penjualan satu paket repleating/bongkaran kapal dengan kondisi besi tua/bongkaran kapal senilai Rp3.201.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang Stasiun PSDKP Biak | Laporan Keuangan Semester I TA 2023 nomor 42/82/2023 tanggal 27 Februari 2023,

dan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 1129B48VV578A29U;

Rincian Pendapatan TA 2021 dan TA 2022

AKUN	URAIAN	2023
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	9.487.608
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.201.000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.569.930
	Total	14.258.538

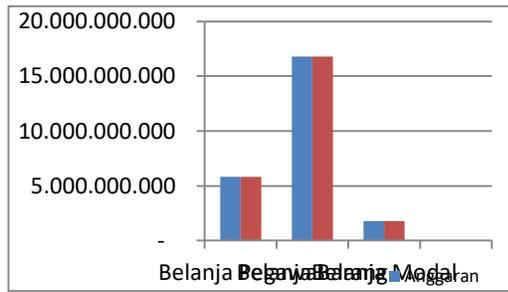
B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp24.405.940,9
72,00*

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2023 adalah sebesar Rp24.405.940.972,00 atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp24.413.120.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada TA 2022 adalah sebesar Rp17.599.498.638,00 atau 100% atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp17.602.668.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	31-Dec-23			31-Dec-22	
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	5.842.308.000	5.842.286.960	100,00	5.218.400.000	5.217.031.323
Belanja Barang	16.804.496.000	16.798.068.812	99,96	11.826.625.000	11.824.831.372
Belanja Modal	1.766.316.000	1.765.585.200	99,959	557.643.000	557.635.943
Total Belanja Kotor	24.413.120.000	24.405.940.972	99,97	17.602.668.000	17.599.498.638
Pengembalian	-	-		-	-
JUMLAH BELANJA	24.413.120.000	24.405.940.972	99,971	17.602.668.000	17.599.498.638



Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 menunjukkan bahwa dari segi persentase realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja pada 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena kenaikan pada Belanja Pegawai ada penambahan 11 orang PPPK dan pekerjaan Repowering Speedboat Pengawas Napoleon 041. .

Belanja

Pegawai

Rp5.842.286.960,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SKDP Biak pada TA 2023 sebesar Rp5.842.286.960,00 dari pagu anggaran sebesar Rp5.842.308.000,00 sedangkan pada TA 2022 sebesar Rp5.217.031.323,00 dari pagu anggaran sebesar Rp5.218.400.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun 2023 mengalami peningkatan dari realisasi belanja Tahun 2022 dikarenakan penambahan pegawai PPPK sebanyak 6 orang Pengawas Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Pengawas Perikanan Terampil, 2 Pengawas Perikanan Pemula. Belanja Pegawai dibayarkan untuk 56 Pegawai dan 159 Jiwa, yaitu meliputi : Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional, Belanja Tunjangan Umum, Belanja Tunjangan Beras, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Tunjangan Khusus (Tunjangan Kinerja Pegawai), dan Tunjangan Khusus Papua dengan Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022
Belanja Gaji Pokok PNS	1.903.516.980	1.835.650.620
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.089	34.637
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	152.645.898	138.591.896
Belanja Tunj. Anak PNS	50.016.916	45.600.725
Belanja Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.240.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	32.210.000	36.010.000
Belanja Tunj. PPh PNS	497.650	372.350
Belanja Tunj. Umum PNS	205.053.000	91.220.000
Belanja Tunj. Beras PNS	141.870.780	136.004.760
Belanja Uang Makan PNS	205.053.000	204.709.000
Belanja Uang Lembur PNS	170.808.000	182.648.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.371.885.206	2.311.235.621
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	227.485.000	223.255.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	151.959.000	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.605	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	5.452.900	-
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.154.670	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	14.100.000	-
Belanja Tunj. Beras PNS	6.879.900	-
Belanja Uang Makan PPPK	24.339.000	-
Belanja Uang Lembur PPK	170.808.000	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	221.439.268	-
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	21.000.000	-
Jumlah Belanja Kotor	5.842.288.862	5.217.572.609
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.902	1.286
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		540.000
Jumlah Pengembalian Belanja	1.902	541.286
Jumlah Belanja	5.842.286.960	5.217.031.323

*Belanja
Barang
Rp16.798.068
.812,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.798.068.812,00 (100%) dari pagu anggaran sebesar Rp16.804.496.000,00 dan TA 2022 per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.824.831.372,00 (100%) dari pagu anggaran TA 2022 Rp11.826.625.000,00. Penyerapan realisasi terbesar ada pada realisasi BBM Kapal Hiu Macan 04. Kapal pengawas tersebut dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-RI 717. Selain itu terdapat belanja barang yang diperuntukkan bagi operasional speedboat dan kapal pengawas berupa belanja pelumas, suku cadang, dan pemeliharaan kapal pengawas dan speedboat serta belanja barang untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan pelanggaran.

- Belanja Barang Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran, perpanjangan STNK kendaraan bermotor, penambah daya tahan tubuh, pengiriman pos, honor pengelola anggaran, dan belanja operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk KP. Hiu Macan 04, belanja bahan makanan untuk AKP, konsumsi kegiatan rapat dan belanja non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan alat tulis kantor, *computer supply*, blanko persuratan, suku cadang KP. HMC 04 dan Speedboat,

daftar arus pasang surut, jurnal dek kapal pengawas, jurnal mesin kapal pengawas, perawatan rutin bulanan kapal pengawas.

- Belanja jasa pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja langganan listrik, telepon dan air, pengiriman surat dinas, belanja jasa konsultan, belanja sewa .
- Belanja pemeliharaan pada Stasiun PSDKP Biak meliputi : pemeliharaan peralatan dan mesin (contohnya perbaikan darurat kapal pengawas, perawatan rutin *speedboat*, pemeliharaan komputer, laptop, AC, genset, kendaraan dinas, dan lain-lain) dan pemeliharaan gedung dan bangunan (pemeliharaan mess, kantor Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan operator Stasiun PSDKP Biak, pemeliharaan bangunan fungsional pengawasan, serta pemeliharaan bak air dan pagar).
- Belanja perjalanan dinas pada Stasiun PSDKP Biak meliputi perjalanan dinas biasa, perjalanan dinas dalam kota, dan perjalanan dinas paket meeting luar kota. antara lain seperti transport lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) dan Sumber Daya Perikanan (SDP) diantaranya pengawasan *destructive fishing*, pengawasan SDP dan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	878.032.046	566.315.443	55,04
Belanja Pemeliharaan	1.795.629.907	973.119.178	84,52
Belanja Perjalanan Dinas	2.189.413.115	1.402.857.127	56,07
Belanja Barang Persediaan	129.888.034	128.970.970	0,71
Belanja Operasional	2.171.300.432	1.617.034.654	34,28
Belanja Non Operasional	9.636.940.558	7.133.143.000	35,10
Jumlah Belanja Kotor	16.801.204.092	11.824.831.372	42,08
Pengembalian Belanja	3.135.280	-	-
Jumlah Belanja	16.798.068.812	11.824.831.372	42,06

Terdapat pengembalian belanja pada Tahun 2023 senilai Rp3.135.280,00 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas Pengendalian Kegiatan dan Anggaran Ditjen PSDKP Tahun 2023 An. Deni Setiyawan Nomor SPT. B.3008/PSDKPSta.8/KP.440/IX/2023, Nomor SPM 00413A. Kode billing setoran pengembalian : 702312280319636, NTPN : E108E5UFMUNAA9PKK.

*Belanja
Modal
Rp1.765.585.
200,00*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.765.585.200,00 dan Rp557.635.943,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan

dibandingkan realisasi TA 2022. Kenaikan realisasi TA 2023 karena adanya penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Repowering Mesin Speedboad Pengawas Napoleon 041 senilai Rp1.692.700.000,00 dan Belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Peralatan Fasilitas Perkantoran senilai Rp72.885.200,00.

Perbandingan Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.885.200	534.628.670	(86,37)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.692.700.000	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	23.007.273	100,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah			0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan			0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan			100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	1.765.585.200	557.635.943	216,62
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	1.765.585.200	557.635.943	216,62

*Belanja
Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk TA 2022 dan 2021.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp72.885.200,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp72.885.200,00 dimana mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp534.628.670,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022
Kamera Underwater		12.996.000
Rak Besi	9.990.000	
Lap Top		54.087.000
Printer		6.192.700
Scanner		19.913.000
Tablet PC		23.946.030
Vertikal Blind	28.600.000	
Home Theater		3.418.800
Lemari Besi/Metal		11.773.400
Filing Cabinet Besi		12.876.000
Sofa	14.710.000	39.516.000
Mic Video Cference	2.885.200	
Teropong (Optik)	16.700.000	
A.C. Split		31.812.600
Genset		280.275.000
Gyro Compass		11.211.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)		2.053.500
Alat Tennis Meja		6.053.940
Video Station (PS5)		18.503.700
Jumlah Belanja Kotor	72.885.200	534.628.670
Pengembalian	-	-

Belanja Modal Gedung dan

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah

*Bangunan
Rp. 0*

sebesar Rp0 dan Rp23.007.273,00. Perbandingan realisasi belanja gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2022	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	23.007.723	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Pengukuran dan Pematangan Lahan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan			100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	23.007.723	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	23.007.723	100,00

*Belanja
Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Gedung dan
Bangunan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan per Triwulan III TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	100,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	100,00

Belanja Modal **B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan**

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp0.
Rp0

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **B.5.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023 dan TA 202 masing-masing adalah sebesar Rp0.
Rp0

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Belanja Modal **B.5.7 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan**

Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Rp0

*Belanja
Modal Aset
Tetap
Lainnya Rp0*

B.5.8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 adalah sebesar Rp0 sedangkan untuk TA 2022 adalah sebesar Rp0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada TA 2023 dan TA 2022 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Uang tunai pada bendahara adalah uang tunai di brankas Rp0 dan uang di rekening bank sebesar Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	-	-
Bank BRI No. Rek 65511525026340002	-	-
Kas Pada BPP	-	-
Uang Muka	-	-
Saldo BP UP	-	-
Kwitansi yang belum di SPM kan	-	-
Sub Total I	-	-
LS Bendahara	-	-
Sub Total II	-	-
Jumlah (Sub Total I - II)	-	-
Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca	-	-
Selisih Kas Bendahara Pengeluaran (tidak ada pecahan uang kecil)	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Tidak terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Piutang PNBPNP Rp14.979.504,00

C.4 Piutang PNBPNP

Saldo Piutang PNBPNP per tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp14.979.504 dan Rp0. Saldo Piutang PNBPNP tahun 2023 berasal dari Koreksi Pencatatan Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 senilai Rp4.024.504,00, telah dilakukan pengembalian dengan NTPN : AD42B2G4VPBRIU59 dan NTB : 240207520851 dan temuan ketidaksesuaian pembayaran belanja pegawai berdasarkan

hasil pemeriksaan BPK Tahun 2023 senilai Rp10.955.000,00 pegawai An. Apyam Mei Kbarek dan Charles Audi katili.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0 **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**
Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Bagian Lancar TPA Rp0 **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0 **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar**
Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Beban Dibayar di Muka Rp0 **C.8 Beban Dibayar di Muka**
Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Pendapatan yang Masih **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**
Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per

Harus

tanggal 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022.

Diterima Rp0

Persediaan

C.10 Persediaan

Rp199.973.189,00

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp199.973.189,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Barang Konsumsi	85.208.292	52.422.535
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	114.764.897	34.210.000
Pita Cukai, Materai, dan Leges	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Persediaan untuk tujuan berjaga-jaga	-	-
Jumlah	199.973.189	86.632.535

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Jenis Persediaan sesuai dengan BA Opname Fisik Persediaan Triwulan III 2022 dengan nomor : B. 2380/PSDKPSta.8/PL.450/IX/2022 tanggal 31 Desember 2022, dijelaskan sebagai berikut :

1. Barang Konsumsi

Persediaan berupa Barang Konsumsi (kode 117111)

senilai Rp85.208.292,00 yang terdiri dari :

- a. Alat Tulis senilai Rp3.483.370,00
- b. Tinta Tulis, Tinta Stempel Rp126.000,00
- c. Penjepit Kertas Rp10.805.305,00
- d. Penghapus / Korektor Rp103.300,00
- e. Buku Tulis Rp9.554.690,00
- f. Ordner dan Map Rp2.953.708,00
- g. Penggaris Rp101.200,00
- h. Cutter (Alat Tulis Kantor) Rp612.000,00
- i. Alat Perekat Rp1.647.360,00
- j. Staples Rp4.975.000,00
- k. Isi Staples Rp179.425,00
- l. Alat Tulis Kantor Lainnya Rp245.972,00
- m. Kertas HVS Rp8.245.950,00
- n. Berbagai Kertas Rp1.461.070,00
- o. Kertas Cover Rp919.090,00
- p. Amplop Rp68.000,00
- q. Tinta/Toner Printer Rp29.454.850,00
- r. USB/Flash Disk Rp4.346.000,00
- s. Mouse Rp2.644.550,00
- t. Bahan Komputer Lainnya Rp122.100,00
- u. Batu Baterai Rp1.452.870,00
- v. Materai Rp910.000,00

w.Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya
Rp796.482,00.

Saldo Awal per 1 Januari 2023 (31 Desember 2022 Audited)	86.632.535
MUTASI TAMBAH	
Penambahan Saldo Awal	
Pembelian	435.465.763
Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Perolehan Lainnya	
Reklasifikasi Masuk	100.000
MUTASI KURANG	
Pemakaian	322.125.109
Tranfer Keluar	
Hibah Keluar	
Barang Usang	
Barang Rusak	
Penghapusan Lainnya	
Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
Penyerahan kepada Masyarakat	
Reklasifikasi Keluar	100.000
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
Koreksi Tambah	200.000
Koreksi Kurang	200.000

Saldo Akhir	199.973.189
-------------	-------------

2. Suku Cadang

Persediaan berupa Bahan baku (kode 117114) senilai Rp114.764.897,00 yang terdiri dari :

- Suku cadang alat angkutan apung bermotor senilai Rp114.764.897,00.
- Suku cadang alat bengkel tidak bermesin, sebesar Rp0,00.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per 31 Desember 2023.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Penyisihan
Piutang tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

,

Tanah

Rp4.529.803.000,00

C.14 Tanah

Tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Biak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.529.803.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	Rp 4.529.803.000
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp -
Selisih Revaluasi Aset	Rp -
Hibah	
Reklasifikasi	
Pengembangan Melalui KDP	Rp -
Mutasi Kurang :	
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2022	4.529.803.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 4.529.803.000

Peralatan

dan Mesin
Rp27.222.726.187,00

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.222.726.187,00 sedangkan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.888.781.077,00 dengan saldo awal per 1 Januari 2023 adalah Rp25.888.781.077,00 dan mutasi tambah melalui pembelian per 31 Desember 2022 sebesar Rp72.885.200,000,00 dan reklasifikasi masuk sebesar Rp597.579.230,00 dan mutasi kurang melalui reklasifikasi keluar sebesar Rp597.579.230,00.

TRANSAKSI	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	25.888.781.077	25.354.152.40
Mutasi Tambah	2.389.978.321	3.277.278.84
Pembelian	72.885.200	536.128.67
Transfer Masuk	4.350.000	
Pengembangan melalui KDP	1.692.700.000	2.143.570.94
Reklasifikasi Masuk	620.043.121	597.579.23
Mutasi Kurang	(1.056.033.211)	(599.079.23
Penghapusan	(413.248.140)	
Transfer Keluar	(22.741.950)	
Reklasifikasi Keluar	(620.043.121)	(597.579.23
Koreksi Pencatatan		(1.500.00
Jumlah Aset	27.222.726.187	28.032.352.02
Akumulasi Penyusutan	(23.277.089.593)	(21.646.959.56
Nilai Buku	3.945.636.594	6.385.392.45

Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp620.043.121,00 berasal dari :

- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Pick Up sebesar Rp452.090.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 5 unit Alat Penerjemah sebesar Rp11.136.365,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 5 unit Mesin Absensi sebesar Rp24.790.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 5 unit Alat Pernerjemah sebesar Rp11.136.365,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 5 unit Mesin Absensi sebesar Rp24.790.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Teropong/Keker sebesar Rp4.191.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 2 unit Teropong/Keker sebesar Rp6.380.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Teropong/Keker sebesar Rp3.535.039,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Teropong/Keker sebesar Rp4.155.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 2 unit Teropong/Keker sebesar Rp16.700.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :

B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp2.000.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Compressor Udara sebesar Rp4.700.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Compressor Udara sebesar Rp3.411.900,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 2 unit Jet Pump sebesar Rp3.313.636,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi tambah berupa transaksi reklasifikasi masuk berupa 1 unit Jet Pump sebesar Rp4.418.181,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp620.043.121,00 berasal dari :

- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Portable Compressor sebesar Rp4.700.000,00 dengan nomor surat keterangan

koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;

- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Portable Compressor sebesar Rp3.411.900,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 2 unit Pompa Air sebesar Rp3.313.636,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Pompa Air sebesar Rp4.418.181,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Kompresor Selam sebesar Rp79.222.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Scanner (Universal Tester) sebesar Rp2.000.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 5 unit Mesin Sandi dan Kelengkapannya sebesar Rp11.136.365,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap :
B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07
Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 5 unit Finger Printer Time and

Attendance Acces Control System sebesar Rp24.790.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Teropong (Optik) sebesar Rp4.191.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 2 unit Teropong (Optik) sebesar Rp 6.380.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Teropong (Optik) sebesar Rp3.535.039,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
- Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 1 unit Teropong (Optik) sebesar Rp4.155.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi reklasifikasi keluar berupa 2 unit Teropong (Optik) sebesar Rp16.700.000,00 dengan nomor surat keterangan koreksi pencatatan modul aset tetap : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023

Mutasi Tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp72.885.200,00 berasal dari pembelian berikut :

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022
Kamera Underwater		12.996.000
Rak Besi	9.990.000	
Lap Top		54.087.000
Printer		6.192.700
Scanner		19.913.000
Tablet PC		23.946.030
Vertikal Blind	28.600.000	
Home Theater		3.418.800
Mic Video Conference	2.885.200	
Lemari Besi/Metal		11.773.400
Filing Cabinet Besi		12.876.000
Mesin Cuci		
Sofa	14.710.000	39.516.000
Teropong (optik)	16.700.000	
A.C. Split		31.812.600
Genset		281.775.000
Gyro Compass		11.211.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)		2.053.500
Alat Tennis Meja		6.053.940
Video Station (PS5)		18.503.700
Jumlah Belanja Kotor	72.885.200	536.128.670
Pengembalian	-	-

Penjelasan mutasi melalui transaksi pembelian per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

- Pembelian 6 unit Rak Besi dengan nilai sebesar Rp9.900.000,00 dengan nomor BAST : 198/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- Pembelian 1 set Sofa dengan nilai sebesar Rp14.710.000,00 dengan nomor BAST : 198/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- Pembelian 26 unit Vertikal Blind dengan nilai sebesar Rp28.600.000,00 dengan nomor BAST : 198/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;
- Pembelian 1 Unit Mic Video Conference dengan nilai sebesar Rp2.885.200,00 dengan nomor Bukti Pembelian

00075/KW/KKP/250263/2023 Tanggal 11 Oktober 2023;

- Pembelian 2 unit Teropong (Optik) dengan nilai sebesar Rp16.700.000,00 dengan nomor BAST : 198/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

Gedung dan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Bangunan

Rp6.303.821.055,00

Nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp6.303.821.055,00 merupakan bangunan Gedung, dan Tugu Titik Kontrol. Sedangkan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.303.821.055,00 .

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Gedung dan Bangunan Kantor	4.247.507.061	4.247.507.061	-
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1.191.925.880	1.191.925.880	-
Pagar Permanen	864.388.114	864.388.114	-
Jumlah Belanja Kotor	6.303.821.055	6.303.821.055	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	6.303.821.055	6.303.821.055	-

Jalan, Jaringan **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

an dan

Irigasi

Rp855.830.143,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023 adalah seluas 32 m² dengan nilai sebesar Rp855.830.143,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 32 m² dengan nilai sebesar Rp859.740.143,00, mutasi tambah sejumlah 0 m² sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sejumlah 0 m² sebesar Rp0,00.

Uraian Jenis Transaksi	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) Rp
Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	855.830.143	-
Jumlah	855.830.143	855.830.143	-

Aset Tetap

Lainnya

Rp0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing dengan nominal Rp0 dan Rp0.

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

Rp52.387.273,00

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023 yaitu sebesar Rp52.387.273,00. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

*Realisasi Perbandingan Bangunan Dalam Pengerjaan
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Awal Tahun	52.387.273	143.777.000
Pekerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Pengembangan KDP	-	-
Perolehan/Penambahan KDP	-	23.007.273
Penghapusan / Penghentian KDP	-	114.397.000
Jumlah Belanja Kotor	52.387.273	52.387.273
Penyelesaian Pembangunan KDP		
Jumlah Belanja	52.387.273	52.387.273

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 1 KDP sebesar Rp52.387.273,00, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebanyak 1 KDP dengan nilai sebesar Rp52.287.273.000, mutasi tambah sebanyak 0 KDP dengan nilai sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebanyak 0 KDP dengan nilai sebesar Rp0,00.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(24.015.11
9.156,00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 Rp(24.015.119.156,00), sedangkan saldo akumulasi penyusutan asset tetap per tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp(22.212.240.049,00) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) :

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.722.726.187	(23.277.089.593)	(20.554.363.406)
2	Gedung dan Bangunan	6.303.821.055	(587.933.970)	5.715.887.085
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	(150.095.593)	705.734.550
4	Tanah	4.529.803.000		
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		14.412.180.385	(24.015.119.156)	(9.602.938.771)

Aset Tak Berwujud Rp0

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 adalah Rp0. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Rp0

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjaan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang
kepada Pihak
Ketiga
Rp21.756.24
8,00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp18.149.947,00 dan Rp21.756.248,00 . Utang kepada pihak ketiga berasal dari tagihan pembayaran langganan air PDAM Bulan Desember 2023 sebesar Rp285.308,00 telah dibayar pada tanggal 11 Januari 2024, tagihan pembayaran telepon dan internet Stasiun PSDKP Biak Rp10.277.639,00 telah dibayar pada tanggal 11 Januari 2024, Uang makan PNS Stasiun PSDKP Biak Periode 15 – 31 Desember 2023 sebesar Rp5.658.000,00 untuk 26 pegawai telah dibayarkan tanggal 12 Januari 2024 SPM Nomor 00006A, Uang makan PPPK Stasiun PSDKP Biak Periode 15 – 31 Desember 2023 sebesar Rp1.929.000,00 untuk 11 pegawai telah dibayarkan tanggal 12 Januari 2024 SPM Nomor 00008A.

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0 **C.27 Pendapatan Diterima di Muka**
Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per per 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0 **C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar**
Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan tanggal 31 Desember 2022.

Ekuitas Rp15.131.271.744,00 **C.29 Ekuitas**
Ekuitas pertanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.131.271.744,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Lainnya Rp6.325.072,00 **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.487.608,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa pembayaran sewa rumah negara selama bulan Januari s/d Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Januari 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 001A .
2. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan

- Februari 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 003A .
3. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Maret 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 046A
 4. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan April 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 075T
 5. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Mei 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 133A
 6. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Juni 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 176A
 7. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Juli 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 235
 8. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Agustus 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 290
 9. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 342
 10. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan Oktober 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 371
 11. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan

September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 421

12. Pendapatan sewa bangunan Negara pada Bulan September 2023 sebesar Rp790.634,00 sesuai dengan dokumen SPM Nomor 488

Rincian Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22
PENDAPATAN		
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9.487.608	7.906.340
JUMLAH PENDAPATAN	9.487.608	7.906.340

Beban

Pegawai

Rp5.839.605.960,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.839.605.960,00 sedangkan Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.218.330.323,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Gaji Pegawai adalah sebagai berikut :

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022
Beban Gaji Pokok PNS	1.903.516.980	1.835.650.620
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.187	33.351
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	152.645.898	138.591.896
Beban Tunj. Anak PNS	50.016.916	45.600.725
Beban Tunj. Struktural PNS	12.600.000	12.240.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	36.210.000	35.470.000
Beban Tunj. PPh PNS	497.650	372.350
Beban Tunj. Beras PNS	141.870.780	136.004.760
Beban Tunj. Umum PNS	90.660.000	91.220.000
Beban Uang Makan PNS	200.443.000	206.008.000
Beban Uang Lembur	170.808.000	182.648.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	227.485.000	223.255.000
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS	2.371.885.206	2.311.235.621
Beban Gaji Pokok PPPK	151.959.000	1.835.650.620
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.605	33.351
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	5.452.900	138.591.896
Beban Tunj. Anak PPPK	1.154.670	45.600.725
Beban Tunj. Fungsional PPPK	14.100.000	35.470.000
Beban Tunj. Beras PPPK	6.879.900	136.004.760
Beban Uang Makan PPPK	26.268.000	206.008.000
Beban Uang Lembur	32.675.000	182.648.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	21.000.000	223.255.000
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan PPPK	221.439.268	2.311.235.621
Jumlah Beban Bersih	5.839.605.960	10.332.828.296

Terdapat transaksi akrual yang terdiri atas pembayaran kekurangan uang makan PNS Stasiun PSDKP Biak periode

15 – 31 Desember 2023 sebesar Rp5.658.000,00 untuk 26 pegawai yang telah dibayarkan pada tanggal 12 Januari 2024 SPM Nomor 00006A dan pembayaran kekurangan uang makan PPPK Stasiun PSDKP Biak periode 15 – 31 Desember 2023 sebesar Rp1.929.000,00 untuk 11 pegawai yang telah dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2024 SPM Nomor 0008A dan telah dilakukan jurnal penyesuaian atas beban tersebut.

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan

Rp97.102.277,00

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp97.102.277,00 dan Rp115.250.092,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2022	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	97.102.277	115.250.092	(15,75)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	-
Bahan Persediaan Suku Cadang	0	0	-
Beban Penyesuaian Nilai Aset Persediaan	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	97.102.277	115.250.092	84,25

*Beban
Barang dan
Jasa
Rp12.685.347.735,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.685.347.735,00 dan Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.327.581.305,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22
Beban Keperluan Perkantoran	1.481.067.018	1.211.428.327
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	144.281.908	131.217.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10.155.964	12.882.292
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	181.350.000	139.930.000
Beban Barang Operasional Lainnya	354.445.542	121.577.035
Beban Bahan	9.208.042.658	6.666.442.200
Beban Honor Output Kegiatan	5.330.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	419.300.300	470.968.400
Beban Langganan Listrik	187.545.079	73.418.207
Beban Langganan Telepon	147.551.532	91.745.346
Beban Langganan Air	35.464.831	33.465.908
Beban Jasa Konsultan	99.511.500	105.278.923
Beban Sewa	253.134.653	171.175.000
Beban Jasa Profesi	4.000.000	5.400.000
Beban Jasa Lainnya	154.166.750	69.248.750
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	23.403.917
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0
Jumlah LO	12.685.347.735	9.327.581.305
Pengembalian Beban Bahan	-	-
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	12.685.347.735	9.327.581.305

Terdapat transaksi akrual yang terdiri atas pembayaran tagihan air PDAM Bulan Desember 2023 sebesar

Rp285.308,00 dan tagihan telepon dan internet bulan Desember 2023 sebesar Rp10.277.639,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 11 Januari 2023 dan telah dilakukan jurnal penyesuaian terhadap beban tersebut.

*Beban
Pemeliharaan
n
Rp1.715.075.
010,00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.715.075.010 dan Rp1.205.275.179,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	392.251.155	166.666.300	135,35
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.097.801.023	804.952.878	36,38
Beban Persediaan Suku Cadang	225.022.832	233.656.001	(3,69)
Jumlah	1.715.075.010	1.205.275.179	42,30

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.186.277.
835,00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.186.277.835,00 dan Rp1.402.857.127,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan

2022 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.766.296.578	1.301.687.127	35,69
Beban Perjalanan Tetap	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.350.000	40.650.000	-67,16
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	42.100.000	22.540.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	364.531.257	37.980.000	859,80
Jumlah	2.186.277.835	1.402.857.127	55,84

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp2.172.977.
696,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.172.977.696,00 dan Rp1.882.229.395,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.000.228.614	1.709.480.314	17,01
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.076.424	126.076.423	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	46.292.724	46.292.724	-
Beban Penyusutan Jaringan	379.934	379.934	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	-
Jumlah Penyusutan	2.172.977.696	1.882.229.395	15,45
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.172.977.696	1.882.229.395	15,45

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Tidak terdapat beban penyisihan Piutang tak tertagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Piutang Tak

Tertagih

Rp(0)

Beban

D.11 Beban Transfer

Transfer Rp0

Tidak ada Beban Transfer 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Surplus dari

D.12 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non

Operasional

Rp4.770.930,

00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp4.770.930,00 dan Rp Rp(85.904.756,00).

URAIAN	31-Dec-22	31-Dec-22
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TA Yang lalu	0	
Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang lalu	0	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.201.000	
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.569.330	
Jumlah Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	4.770.330	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar	0	2.710.349
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	114.397.000
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	25.781.895
Surplus defisit pelepasan aset non lancar		(111.686.651)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	25.781.895
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	4.770.330	(85.904.756)

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2018.*

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.770.930,00 diperoleh dari :

A. Pendapatan dari penjualan peralatan & mesin sebesar Rp1.569.930,00 dengan rincian:

1. Penjualan satu paket inventaris kantor berupa 2 unit penghancur kertas merk Shredstar S5, 3 unit Handy Talky (HT) merk Kenwood, 2 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 3 unit Printer (Peralatan Personal Komputer), 1 unit Water Jet Ejector merk Sanchin, 1 unit Digital Video Effect merk Olympus - Tough, 1 unit Camera Digital merk Nikon - Waterproof, 6 unit lap top merk Toshiba, 1 unit Tablet PC merek Samsung Galaxy, 1 unit A.C. split merk Sharp, dan 2 unit P.C Unit merk Asus dan Lenovo dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp739.254,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 10/85/2023 tanggal 14 Februari 2023, dan bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 9D38761QUQBJB92G
2. Penjualan satu paket inventaris kantor berupa 1 unit Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) merk ACHILLES TYPE SGX 132, 2 unit Water Quality Checker merk Hanna, 300 unit Peta merk Standar Hidros, dan 3 unit A.C. Split merk Polytron dan Panasonic dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp455.686,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 23/85/2023 tanggal 21 Maret 2023, dan bukti Penerimaan

- Negara dengan NTPN C2A3D7QLUFJ04QVM; dan
3. Penjualan satu unit Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus) merk Silingger dengan kondisi rusak berat dengan nilai Rp374.990,00 sesuai dengan risalah lelang nomor 65/85/2023 tanggal 20 Juni 2023, dan bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 277432G4VGEAGNU8

B. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Rp.3.201.000,00 :

Penjualan satu paket repleating/bongkaran kapal dengan kondisi besi tua/bongkaran kapal senilai Rp3.201.000,00 sesuai dengan Risalah Lelang Stasiun PSDKP Biak | Laporan Keuangan Semester I TA 2023 nomor 42/82/2023 tanggal 27 Februari 2023, dan Bukti Penerimaan Negara dengan NTPN 1129B48VV578A29U;

*Pos Luar
Biasa Rp0*

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp15.483.258,00 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.483.258.786,00 dan Rp17.085.202.702,00.

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

(Rp24.682.127.975,00) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(24.682.127.975,00) dan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(19.229.521.837,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Aset Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Persediaan Rp0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi

Aset Tetap

Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak ada nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Koreksi Nilai

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Aset Non

Revaluasi

Rp(59.771.01

4)

Koreksi atas Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset tetap yang diakibatkan adanya kenaikan asset tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(59.771.014,00) dan Rp(28.739.933,00).

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31-Dec-23	31-Dec-22
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(59.771.014)	(28.739.933)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-	-
Jumlah	(59.771.014)	(28.739.933)

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2023 terjadi karena melakukan reklasifikasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

1. Penghapusan 2 unit Water Quality Checker dengan sisa nilai buku besar Rp1.783.072,00;
2. Penghapusan 2 unit Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan sisa nilai buku besar Rp4.287.938,00;
3. Penghapusan 2 unit Penghancur Kertas dengan sisa nilai buku besar Rp 1.199.516,00;

4. Transaksi Reklasifikasi Masuk Jet Pump sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar -Rp621.307,00 dengan nomer BA koreksi : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023;
5. Transaksi Reklasifikasi Masuk Compressor Udara sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp53.121.795,00 dengan nomer BA koreksi : B.2514/PSDKPSta.8/PL.110/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Tidak ada koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar Entitas Rp24.389.911.947,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp24.389.911.947,00 dan Rp17.656.317.854,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas	31-Dec-22	31-Dec-22
Ditagihkan ke Entitas Lain	24.405.940.972	17.599.498.638
Diterima dari Entitas Lain	(14.258.538)	(36.398.584)
Transfer Masuk	3.915.000	93.217.800
Transfer Keluar	(5.685.487)	-
Jumlah	24.389.911.947	17.656.317.854

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(14.258.538,00), sedangkan DKEL sebesar Rp24.405.940.972,00. Sedangkan Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Transfer Masuk berupa Finger printer time and attendance acces control system sebanyak 3 unit dengan nilai buku sebesar Rp3.915.000,00

dengan nomer BA : B.4957/PSDKP.1/PL.450/IX/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Transfer Keluar sampai dengan periode tanggal 30 September 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi Transfer Keluar berupa Lap Top sebanyak 1 unit dengan nilai buku sebesar Rp(5.685.487,00) dengan nomer BA :B.2515/PSDKPSta.8/PL.450/IIIV/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

*Kenaikan/
Penurunan
Ekuitas
Rp(351.987.0
42,00)*

E.5 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(351.987.042,00) dan 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.601.943.916,00).

*Ekuitas
Akhir
Rp15.131.27
1.744,00*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.131.271.744 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.483.258.786,00

f. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023 pada Stasiun PSDKP Biak

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.30/MEN/KU.611/2020 tanggal 03 Juli 2020 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/MEN-KP/KU.611/2023 Tentang Perubahan Kelima Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.038/Sta.8/KU.110/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.039/Sta.8/KU.110/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak, telah

dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan.

Penggantian pejabat dimaksud adalah sebagai berikut :

KPA	: Mochamad Erwin, S.St.Pi., MH
PPK	: Ismail, A.Pi., M.S.T.Pi Exfar Alli Ridwan, S.Pi
PPSPM	: Julistrio Bobby, S.Kel
Bendahara	: Ariyanti Sastriani, S.Pi

Stasiun PSDKP Biak telah sedang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa pada Semester I Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara kontraktual, pekerjaan tersebut diantaranya:

- a. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor B.53/PSDKPSta.8/KU.340/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 055/PSDKPSta.8/PL.430/I/2023 tanggal 5 Januari 2023;
- b. Pekerjaan Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor B.54/PSDKPSta.8/KU.340/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Pekerjaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor B.57/PSDKPSta.8/KU.340/I/2023 tanggal 4 Januari 2023;

- c. Bahan Bakar Minyak untuk Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor 062/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/III/2023 tanggal 07 Maret 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp8.782.686.000,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 07 Maret sampai dengan 31 Desember 2023 selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender. Telah di adakan Adendum perubahan jumlah termin yg semula 15 termin menjadi 18 termin dengan nomor adendum 253/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VIII/2023. Tanggal 30 Agustus 2023;
- d. Pengadaan Suku Cadang Kapal Pengawas dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak/ SPK nomor 050/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/II/2023 tanggal 22 Februari 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp288.549.484,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Mei 2023 selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor

077.a/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/III/2022

tanggal 23 Maret 2023;

- e. Pengadaan Seragam Pegawai dilaksanakan sesuai dengan dokumen SPK nomor 087/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/III/2023 tanggal 29 Maret 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp68.033.010,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 29 Maret sampai dengan 27 Mei 2023 selama 60 (enam puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 164/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/V/2023 Tanggal 26 Mei 2023;
- f. Pengadaan Seragam PDL AKP Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor 103/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/IV/2023 tanggal 12 April 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp74.00.000,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 12 April sampai dengan 11 Mei 2023 selama 30 (tiga puluh) hari kalender. Pengadaan ini sudah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 117/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/IV/2023 tanggal 26 April 2023;
- g. Repowering Mesin Spedboat Pengawas Napoleon 041 dilaksanakan sesuai dengan

dokumen kontrak nomor 139/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/V/2023 tanggal 10 Mei 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp1.650.027.546,00 (termasuk pajak). Waktu pelaksanaan kontrak tanggal 19 Mei sampai dengan 15 September 2023 selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dengan jaminan uang muka nomor BG14223209046 tanggal 17 Mei 2023. Telah di adakan Adendum perubahan Nilai kontrak yang semula Rp1.650.027.546,00 menjadi Rp 1.692.700.000,00 dengan Nomor Adendum 252/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/VIII/2023 Tanggal 29 Agustus 2023;

- h. Pengawasan Repowering Mesin Speedboat Pengawas Napoleon 04 sesuai dengan dokumen dokumen kontrak nomor 145/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/V/2023 tanggal 17 Mei 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp99.511.500,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 19 Mei sampai dengan 15 September 2023 selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender;
- i. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan sesuai dengan dokumenn kontrak nomor 175/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/V/2023 tanggal 31 Mei sampai dengan 29 Juli 2023 selama 60 (enam puluh) hari kalender. Pengadaan ini telah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST Nomor

229/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VIII/2023

Tanggal 2 Agustus 2023;

- j. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sesuai dokumen kontrak nomor 190/PPK/PSDKPSta.8/PL.430.VI/2023

Tanggal 19 Juni 2023. Nilai kontrak pada pekerjaan ini sebesar Rp70.000.000,00 (termasuk pajak) dengan waktu pelaksanaan kontrak tanggal 19 Juni sampai dengan 17 Agustus 2023 selama 60 (enam puluh) hari kalender. Pengadaan ini telah diserahkan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST Nomor 198/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023.

- k. Sisa BBM Kapal Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Biak per tanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Kapal Pengawas	Jumlah BBM (L)	Harga Satuan BBM (Rp)	Total (Rp)
1	Hiu Macan 04	40.306	26.485	1.067.494.334

Sisa BBM kapal pengawas tersebut akan digunakan untuk stasioner Mesin Induk dan Mesin Bantu kapal serta mendukung rencana operasi kapal pengawas di awal tahun 2024 (mengantisipasi keterlambatan penandatanganan kontrak kerjasama dengan PT. Pertamina Patra Niaga).

- i. Terdapat temuan ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Nomor : B.192/PSDKP.1/HP.520/III/2024 An. Apyam Mei Kbarek Tahun 2021-2023 senilai Rp7.070.000,00.
- Bukti Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2021 An. Apyam Mei Kbarek senilai Rp1.980.000,00 NTPN : 991CF48VVEPJ501S dan NTB : 240507284175.
 - Bukti Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2022 An. Apyam Mei Kbarek senilai Rp2.520.000,00 NTPN : 3C13C61QV3UBV0LO dan NTB : 240507284077.
 - Bukti Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 An. Apyam Mei Kbarek senilai Rp2.570.000,00 NTPN : FE53C6U8EUGOC0IP dan NTB : 240507283915.

m. Terdapat temuan ketidaksesuaian pembayaran Belanja Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Nomor : B.1429/PSDKP.1/HP.520/III/2024 An. Charles Audi Katili Tahun 2022-2023 senilai Rp3.885.000,00.

➤ Bukti Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2022 An. Charles Audi Katili Rp2.220.000,00 NTPN : 870363CIFK76O04U dan NTB : 240507283755.

➤ Bukti Pengembalian Belanja Tunjangan Umum Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar Tahun 2023 An. Charles Audi Katili Rp1.665.000,00 NTPN : C0FF355DF9BVII7P dan NTB : 240507283656.

Program Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 Stasiun PSDKP

Biak meliputi :

- a. QHD.001 Operasi Kapal Pengawas Target Operasi 62 Hari Operasi dengan Pagu Rp10.471.763,00. Capaian Hari Operasi s.d 31 Desember 2023 adalah 62 Hari Operasi dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp10.471.645.739,00;
- b. QHD.003 Operasi Speedboad Pengawas Target Operasi 30 Hari Operasi dengan Pagu Anggaran Rp343.910.000,00. Capaian Hari Operasi 30 Hari Operasi dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp342.190.450,00.;
- c. RCG.001 Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat sebanyak 3 Unit dengan Pagu Anggaran Rp2.717.840.00,00 Realisasi Anggaran Rp2.704.250.800,00;
- d. QIC. 003 Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya sebanyak 8 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan Nilai Pagu Anggaran Rp174.107.000,00. Pelaku Usaha yang telah diperiksa s.d 31 Desember 2023 sebanyak 35 Pelaku Usaha dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp173.236.465,00;
- e. QIC.001 Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak sebesar 40 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan Nilai Pagu Rp154.833.000,00. Output usaha yang telah

- diperiksa sebanyak 91 Pelaku Usaha dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp154.815.780,00;
- f. QIC.001 Unit Usaha Sektor Perikanan yang Diawasi kepatuhannya sebanyak 10 Pelaku Usaha/Lembaga/Laporan dengan Nilai Pagu Rp82.302.000,00. Output usaha yang telah diperiksa sebanyak 10 Pelaku Usaha dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp81.890.490,00.